

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan ancaman bagi semua organisasi di setiap negara, di dalam industri apapun. Hasil survei ACFE Global menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata dari 5% pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Penelitian yang dilakukan ACFE Indonesia Chapter tentang Survei *Fraud* Indonesia (2016) menyatakan *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebesar 67% responden memilih korupsi, 31% memilih penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan, dan *fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih responden sebanyak 2%.

Gambar 1.1 dibawah ini menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan dengan adanya korupsi adalah pemerintah sebanyak 58,8%, dan industri keuangan dan perbankan menjadi industri yang paling dirugikan kedua dengan persentase 15,9% dari jumlah kasus-kasus yang lainnya.



Gambar 1.1 Persentase Kejadian *fraud* pada Berbagai Industri di Indonesia

Sumber: ACFE Indonesia Chapter (SFI, 2016)

Hal ini berbeda dengan *Report to The Nation* (2016) yang dikeluarkan ACFE Global, pihak yang paling banyak dirugikan adalah industri keuangan dan perbankan pada posisi pertama dengan persentase 16,8%. Perbedaan pihak yang dirugikan ini diakibatkan oleh kecenderungan para pelaku *fraud* di Indonesia sering memanfaatkan proyek yang dilakukan pemerintah. Sehingga secara langsung para pelaku tersebut melakukan korupsi yang merugikan pemerintah dan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai contoh kasus pemerintah dan kaitannya dengan industri keuangan dan perbankan yang pernah terjadinya di Indonesia dan juga menimpa Bank Indonesia adalah kasus audit Bank Indonesia atas aliran dana YPPI sebesar Rp 100 Miliar. Dana Rp 100 Miliar YPPI yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003 senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI. Sedangkan yang selebihnya, Rp68,5 miliar, digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum mantan Gubernur BI, mantan Direksi dan mantan Deputy Gubernur Senior BI dalam kasus BLBI. Kasus yang terjadi pada bulan maret 2005 ini adalah murni temuan tim audit BPK. Ketika tim audit BPK di BI menemukan adanya asset tanah BI yang digunakan oleh YLPPI. Dan berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh KAP Muhammad Thoha atas perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangan per Juni 2003, diketahui adanya penurunan nilai asset sebesar Rp 93 Miliar.

Disusul dengan kasus Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 di Indonesia dimana terjadinya gagal kliring yang mengakibatkan dihentikannya perdagangan oleh BEI sampai dengan diambil alihnya (*Bail Out*) Bank Century oleh pemerintah. Sampai saat ini masih banyak kalangan yang menganggap bahwa kasus Bank Century belumlah terselesaikan secara tuntas (Festi, 2014). Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut, yang berupa adanya penipuan pihak manajemen yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah menyangkut penyelewengan dana nasabah Bank Century hingga Rp 2,8 T dari nasabah Bank Century dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia dan penjualan dana reksa fiktif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia. Dimana

produk tersebut tidak memiliki izin dari BI dan Bappepam LK. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century. (Windasari, 2016). Kasus *Bailout* Bank Century ini juga menjerat dua mantan pejabat Bank Indonesia yaitu Budi Mulya (mantan Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter) ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan Siti Fadrijdah (Deputi Gubernur BI bidang pengawasan) dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab atas turunnya dana talangan ke Bank Century. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada tahun 2008 dan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal.

Kasus diatas merupakan kasus kecurangan yang terjadi di perbankan adapun faktor penyebab terjadinya *fraud* tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang disebut sebagai *fraud triangle*. Setiap organisasi umumnya menghadapi risiko *fraud*. The ACFE dalam Purba (2015) membagi 3 jenis *fraud* yang lazim dilakukan perusahaan/organisasi antara lain : Pertama, korupsi yaitu penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kedua, penyalahgunaan aktiva/aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva atas entitas, dan yang ketiga, laporan keuangan yang menyesatkan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Jenis-jenis *fraud* tersebut sudah seharusnya dihilangkan salah satunya dengan cara mencegah risiko internal terjadinya *fraud* tersebut. Karena *fraud* sama saja seperti penyakit, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Sebab begitu besar dampak buruk dan banyak pihak yang dirugikan apabila *fraud* sudah terjadi. Maka dari itu upaya pertama yang dilakukan dari semua organisasi di berbagai industri terutama dari industri keuangan dan perbankan adalah mencegah *fraud*. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008, h. 37) pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu dengan memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, dan mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukannya.

Namun, pencegahan saja belum lah cukup, perusahaan juga harus memahami bagaimana cara pendeteksian *fraud*, inilah langkah penting yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengetahui ada tidaknya *fraud*. Mendeteksi kecurangan (*fraud*) adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. (Kumaat, 2011, h. 156). Terjadinya perilaku penyimpangan yang tidak terdeteksi oleh bagian audit akan menyebabkan banyak kerugian yang serius bagi perusahaan. (Shindy&Lilis, 2017). Mengatasi hal ini, yang dibutuhkan adalah peranan dari audit internal yang dapat berperan aktif untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* tersebut.

Menurut 2018 *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuses* menyatakan 73% peran Departemen Audit Intern dapat menekan terjadinya *fraud* di dalam organisasi. Peran audit internal diperlukan, karena audit internal suatu bagian yang independen yang disiapkan perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian, dan keberadaan audit internal ditujukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. (Tugiman, 2006 dalam Festi, 2016). Walaupun auditor internal tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, setidaknya audit internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi risiko *fraud* meskipun tidak seahli seseorang yang tanggung jawabnya mendeteksi dan menginvestigasi *fraud*. Audit internal diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberi rekomendasi yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan demikian, keberadaan Departemen Audit Internal pada suatu organisasi/perusahaan diharapkan dapat menjadi nilai tambah untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya terutama dalam hal mencegah dan mendeteksi *fraud*.

Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral yang dimiliki Indonesia merupakan lembaga keuangan sentral yang memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian suatu negara. Secara garis besar, peranan strategis bank sentral dapat terlihat dari enam peran dan fungsi bank sentral, yaitu sebagai bank sirkulasi, kasir pemerintah, *bankers* bank, otoritas moneter, otoritas sistem keuangan dan otoritas sistem pembayaran. (Simorangkir, 2014, h. 11)

Melihat peran serta fungsi dari Bank Indonesia sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, keberadaan audit internal merupakan bagian yang diperlukan bagi Bank Indonesia. Sesuai dengan pengertian IIA tentang audit internal yaitu aktivitas independen dan objektif untuk memberikan keyakinan memadai dan penyedia konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Selain itu, audit internal juga dapat membantu Bank Indonesia mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengendalian, proses manajemen resiko, proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Hasil dari audit internal tersebut diharapkan mampu meningkatkan reabilitas informasi dan kinerja dalam organisasi maupun instansi, dan meyakinkan manajemen bahwa laporan keuangan dan non keuangan yang dihasilkan merupakan data/laporan yang akurat dan tepat sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan terlebih untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*.

Bank Indonesia (BI) memiliki kedudukan yang berbeda dari lembaga Negara lainnya. Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen, yang artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia memiliki pengaruh penting dalam perekonomian. Oleh sebab itu, Peran Audit Internal Bank Indonesia diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien yang bebas dari kecurangan yang dapat menghambat kinerja dan penurunan reputasi bagi BI. Berdasarkan alasan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Audit Internal untuk Mencegah dan Mendeteksi *Fraud* Pada Bank Sentral (Studi Kasus di Bank Indonesia Kantor Pusat)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah peranan audit internal berpengaruh untuk mencegah *fraud* di Bank Indonesia?
2. Apakah peranan Audit Internal berpengaruh untuk mendeteksi *fraud* di Bank Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah peranan audit internal berpengaruh untuk mencegah *fraud* di Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah peranan audit internal berpengaruh untuk mendeteksi *fraud* di Bank Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan menambah pengetahuan dan referensi mengenai audit internal, terutama tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*.
2. Bagi Instansi
Menjadi bahan masukan untuk melakukan peningkatan pada kinerja audit internal, sehingga kualitas audit internal semakin baik terutama dalam rangka pencegahan dan pendeteksian terjadinya *fraud*.
3. Bagi Pihak Lain
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya terutama dalam hal pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang diteliti hanya mengenai peranan seorang audit internal untuk dapat mencegah dan mendeteksi *fraud*. Penulis membatasi bahwa responden yang diteliti adalah hanya pegawai yang berada di Departemen Audit Intern Bank Indonesia Kantor Pusat, lantai 8 gedung C, Jl. M.H Thamrin no. 2 Jakarta Pusat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian ini seperti audit internal dan *fraud*. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan hubungan antar variabel.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang diskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini berisi tentang penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi manajerial dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

